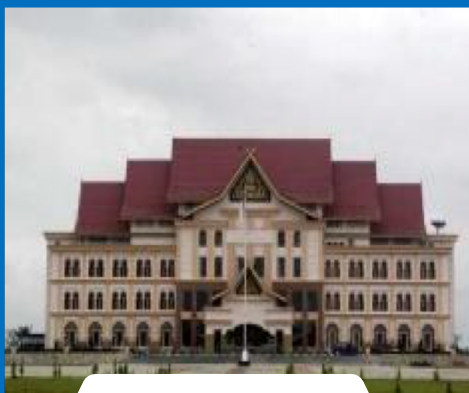


**TAHUN
2019**



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2019



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (BAPPEDA) Tahun 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada Perubahan Renja 2019 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2016-2021 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2019 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA)) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA DUMAI**

KEPALA,

MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19630614 198803 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika	5
BAB II EVALUASI RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Dumai	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	33

BAPPEDA KOTA DUMAI - 2019



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BAPPEDA Kota Dumai s.d. Triwulan II Tahun 2019	8
Tabel 2.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan	19
Tabel 2.3	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Bappeda Berdasarkan Telaahan Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021	24
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	26
Tabel Lampiran	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2019	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan Renja Provinsi. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diterima. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala

Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda. Hasil penyempurnaannya diserahkan kembali ke Bappeda paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:
Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda dan menyampaikannya kembali ke Bappeda. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
3. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah:
BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Bappeda dilakukan setelah Bappeda menerima Surat Walikota Dumai Nomor 050/971/Bappeda tanggal 26 Juni 2019, Perihal Penyampaian Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2019 ini mempedomani Rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Perumusan rancangan perubahan Renja ini mencakup:

- 1) Analisis gambaran pelayanan BAPPEDA;
- 2) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2019; dan
- 3) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA.

Rancangan perubahan Renja Bappeda Tahun 2019 ini akan disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi agar penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Bappeda telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Rancangan perubahan Renja ini akan disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi dari Kepala Bappeda. Selanjutnya rancangan perubahan Renja yang telah diverifikasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Rancangan akhir perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan Rancangan Renja Perubahan Bappeda Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019
 16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 24 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen perubahan Renja Bappeda Kota Dumai tahun 2019 adalah tersedianya dokumen rancangan perubahan Renja Bappeda Tahun 2019 yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Bappeda dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Kota Dumai Tahun 2019.

Adapun tujuan dari penyusunan rancangan Perubahan Renja Bappeda ini adalah untuk memastikan bahwa perubahan Renja Bappeda ini telah disusun selaras dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap dokumen perubahan Renja Bappeda telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen rancangan perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Dumai Tahun 2019, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja, proses penyusunan perubahan Renja, serta keterkaitan antara rancangan perubahan Renja Bappeda dengan rancangan akhir dokumen perubahan RKPD Kota Dumai tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen rancangan perubahan Renja Bappeda Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2019 sampai dengan Triwulan Kedua

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 sampai dengan TW II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan target indikator kinerja pada Renja Bappeda Tahun 2018.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan rancangan perubahan rencana kerja dan pendanaan Bappeda yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda dilakukan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Bappeda maupun RPJMD Kota Dumai. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Bappeda Tahun 2019 sampai dengan TW II dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2019. Jika sampai dengan TW II ditemukan program/kegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai di akhir tahun rencana. Pada Tabel 2.1 berikut terlampir hasil evaluasi Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat tingkat capaian kinerja Bappeda sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BAPPEDA Kota Dumai s.d. Triwulan II Tahun 2019

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PADA RENSTRA TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019			
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	6		7			6		9		10		13		14		15			
1 03	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
1 03 4 03 01 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang	1 dokumen	430.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	555.000.000	0 dokumen	70.331.696	0 dokumen	129.350.096	0 dokumen	129.350.096	1 dokumen	430.000.000	3 dokumen	1.311.003.050		
1 03 4 03 01 31 05	Penyusunan rencana detail tata ruang	Jumlah dokumen rencana detail tata ruang dan Rancangan RDTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 03 4 03 01 31 06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan terhadap RTRW	-	-	-	-	-	1 dokumen	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 03 4 03 01 31 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	240.000.000	35 kali	35 kali	100%	15 kali	240.000.000	4 kali	68.431.696	6 kali	103.450.096	10 kali	103.450.096	15 kali	240.000.000	50 kali	825.280.910		
1 03 4 03 01 31 13	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	190.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	190.000.000	0 dokumen	1.900.000	0 dokumen	25.900.000	0 dokumen	25.900.000	1 dokumen	190.000.000	3 dokumen	485.722.140		
1 03 4 03 01 31	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	155.000.000	100%	0%	0%	100%	255.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	155.000.000	100%	305.000.000		
1 03 4 03 01 31 07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder terkait	-	-	-	-	-	15 stakeholder	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 03 4 03 01 31 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	155.000.000	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	155.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	155.000.000	2 dokumen	305.000.000		
1 03 4 03 01 31	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	204.000.000	100%	0%	0%	100%	204.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	404.000.000		
1 03 4 03 01 31 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	100%	204.000.000	100%	0%	0%	100%	204.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	404.000.000		
1 04	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																				
1 04 4 03 01 31	Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	100%	430.000.000	100%	100%	100%	100%	430.000.000	25%	70.350.000	25%	111.764.000	50%	111.764.000	100%	350.000.000	100%	1.110.940.339		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PADA RENSTRA TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019			
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	6		7			6		9		10		13		14		15			
1 04 4 03 01 31 03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	430.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	430.000.000	0 dokumen	70.350.000	0 dokumen	111.764.000	0 dokumen	111.764.000	1 dokumen	350.000.000	3 dokumen	1.110.940.339		
1 04 4 03 01 31 04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 07	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																				
2 07 4 03 01 31	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	300.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	300.000.000	0 dokumen	14.141.000	0 dokumen	57.321.000	0 dokumen	57.321.000	1 dokumen	300.000.000	3 dokumen	775.754.000		
2 07 4 03 01 31 05	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	300.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	300.000.000	0 dokumen	14.141.000	0 dokumen	57.321.000	0 dokumen	57.321.000	1 dokumen	300.000.000	3 dokumen	775.754.000		
4 01	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																				
4 01 4 03 01 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	80.000.000	-	-	-	90%	80.000.000	0%	-	30%	5.906.000	30%	5.906.000	90%	80.000.000	90%	80.000.000		
4 01 4 03 01 43 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	80.000.000	-	-	-	90%	80.000.000	0%	-	30%	5.906.000	30%	5.906.000	90%	80.000.000	90%	80.000.000		
4 02	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN																				
4 02 4 03 01 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000	-	-	-	80%	250.000.000	20%	4.920.000	20%	9.835.000	40%	9.835.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000		
4 02 4 03 01 20 25	Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah dokumen TEPPA yang disusun	4 dokumen	250.000.000	-	-	-	4 dokumen	250.000.000	0 dokumen	4.920.000	0 dokumen	9.835.000	0 dokumen	9.835.000	4 dokumen	250.000.000	4 dokumen	250.000.000		
4 03	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																				
4 03 4 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.456.193.660	100%	100%	100%	100%	2.456.193.660	25%	404.314.046	25%	946.946.176	50%	946.946.176	100%	2.286.193.660	100%	6.666.706.400		
4 03 4 03 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.600.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	3.600.000	3 bulan	-	3 bulan	1.800.000	6 bulan	1.800.000	12 bulan	3.600.000	36 bulan	9.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PADA RENSTRA TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019			
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	6		7			6		9		10		13		14		15			
4 03 4 03 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jaringan komunikasi	6 bulan	10.000.000	7 bulan	7 bulan	100%	0 bulan	-	-	-	-	-	-	6 bulan	10.000.000	13 bulan	114.000.000			
4 03 4 03 01 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Partisipasi Bappeda dalam pameran Dumai Expo	1 kali	30.000.000	2 kali	2 kali	100%	1 kali	30.000.000	0 kali	-	0 kali	-	0 bulan	-	3 kali	178.350.000				
4 03 4 03 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas	25 unit	55.000.000	-	-	-	25 unit	55.000.000	2 unit	2.842.760	4 unit	4.938.760	6 unit	4.938.760	25 unit	55.000.000	25 unit	55.000.000		
4 03 4 03 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	125.000.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	125.000.000	3 bulan	33.097.000	3 bulan	58.297.000	6 bulan	58.297.000	12 bulan	125.000.000	36 bulan	358.258.300		
4 03 4 03 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	93 unit	84.350.000	10 unit	10 unit	100%	93 unit	84.350.000	2 unit	3.750.000	20 unit	21.150.000	22 unit	21.150.000	93 unit	84.350.000	103 unit	173.050.000		
4 03 4 03 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	199.000.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	199.000.000	3 bulan	-	3 bulan	70.878.600	6 bulan	70.878.600	12 bulan	199.000.000	36 bulan	660.194.776		
4 03 4 03 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.747.660	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	62.747.660	3 bulan	25.100.320	3 bulan	33.466.800	6 bulan	33.466.800	12 bulan	62.747.660	36 bulan	195.695.660		
4 03 4 03 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	190.000.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	240.000.000	3 bulan	19.171.400	3 bulan	19.171.400	6 bulan	19.171.400	12 bulan	50.000.000	36 bulan	328.635.000		
4 03 4 03 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	50.000.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	50.000.000	3 bulan	4.730.000	3 bulan	9.760.000	6 bulan	9.760.000	12 bulan	50.000.000	36 bulan	119.260.400		
4 03 4 03 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	84.096.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	84.096.000	3 bulan	10.305.000	3 bulan	10.305.000	6 bulan	10.305.000	12 bulan	84.096.000	36 bulan	253.884.000		
4 03 4 03 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	740.000.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	700.000.000	3 bulan	187.057.566	3 bulan	423.178.616	6 bulan	423.178.616	12 bulan	740.000.000	36 bulan	1.968.960.650		
4 03 4 03 01 01 19	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	122.400.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	122.400.000	3 bulan	20.400.000	3 bulan	51.000.000	6 bulan	51.000.000	12 bulan	122.400.000	36 bulan	387.289.239		
4 03 4 03 01 01 20	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	700.000.000	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	700.000.000	3 bulan	97.860.000	3 bulan	243.000.000	6 bulan	243.000.000	12 bulan	700.000.000	36 bulan	1.865.128.375		
4 03 4 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.820.000.000	100%	100%	100%	100%	1.820.000.000	25%	204.995.170	25%	981.943.020	50%	981.943.020	100%	1.720.000.000	100%	4.516.672.000		
4 03 4 03 01 02 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	200.000.000	-	-	-	-	-	1 kegiatan	200.000.000	2 kegiatan	400.000.000			
4 03 4 03 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	300.000.000	-	-	-	2 unit	600.000.000	-	-	-	268.200.000	-	268.200.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000		
4 03 4 03 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	200.000.000	9 unit	8 unit	89%	9 unit	200.000.000	15 unit	9.900.000	7 unit	109.316.000	22 unit	109.316.000	26 unit	200.000.000	49 unit	523.198.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) PADA RENSTRA TAHUN 2019			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) DAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019		
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	6			7			6		9		10		13		14		15		
4 03 4 03 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	200.000.000	2 unit	2 unit	100%	11 unit	200.000.000	6 unit	81.259.500	11 unit	173.458.000	17 unit	173.458.000	19 unit	200.000.000	32 unit	733.910.000		
4 03 4 03 01 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	0 paket	-	1 paket	1 paket	100%	-	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	1 paket	100.000.000		
4 03 4 03 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	220.000.000	6 unit	6 unit	100%	8 unit	220.000.000	0 unit	-	2 unit	193.986.500	2 unit	193.986.500	3 unit	220.000.000	9 unit	900.000.000		
4 03 4 03 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	25 kendaraan	400.000.000	24 kendaraan	24 kendaraan	100%	24 kendaraan	400.000.000	5 kendaraan	113.835.670	7 kendaraan	236.982.520	12 kendaraan	236.982.520	25 kendaraan	400.000.000	25 kendaraan	1.259.564.000		
4 03 4 03 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	3 unit	300.000.000	-	-	-	0 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	200.000.000	3 unit	300.000.000		
4 03 4 03 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	0%	-	100%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	50.000.000		
4 03 4 03 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atribut ASN	0 set	-	36 set	0 set	0%	0 set	-	-	-	-	-	-	-	0 set	-	36 set	50.000.000		
4 03 4 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85%	530.000.000	7 orang	8 orang	114%	85%	530.000.000	0%	20.840.000	34%	21.840.000	34%	21.840.000	85%	530.000.000	85%	580.000.000		
4 03 4 03 01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	12 orang	130.000.000	7 orang	8 orang	114%	12 orang	130.000.000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	12 orang	130.000.000	12 orang	180.000.000		
4 03 4 03 01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	200.000.000	-	-	-	1 kali	200.000.000	0 kali	-	0 kali	-	0 orang	-	1 kali	200.000.000	1 kali	200.000.000		
4 03 4 03 01 05 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	200.000.000	-	-	-	12 bulan	200.000.000	3 bulan	20.840.000	3 bulan	21.840.000	6 orang	21.840.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000		
4 03 4 03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 dokumen	130.000.000	6 dokumen	6 dokumen	100%	5 dokumen	130.000.000	0 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	5 dokumen	130.000.000	11 dokumen	219.240.000		
4 03 4 03 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	70.000.000	4 dokumen	4 dokumen	100%	3 dokumen	70.000.000	0 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	3 dokumen	70.000.000	7 dokumen	117.600.000		
4 03 4 03 01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	60.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	2 dokumen	60.000.000	4 dokumen	101.640.000		
4 03 4 03 01 15	Program pengembangan data/ informasi	Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	70%	550.000.000	60%	60%	100%	70%	550.000.000	15%	22.500.000	15%	119.705.600	30%	119.705.600	70%	550.000.000	70%	1.382.946.000		
4 03 4 03 01 15 05	Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen informasi tentang statistik Kota Dumai	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	253.171.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PADA RENSTRA TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019			
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	6		7			6		9		10		13		14		15			
4 03 4 03 01 15 07	Sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	350.000.000	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	3 aplikasi	350.000.000	3 aplikasi	16.800.000	3 aplikasi	94.789.000	3 aplikasi	94.789.000	3 aplikasi	350.000.000	3 aplikasi	929.775.000		
4 03 4 03 01 15 08	Penyusunan data perencanaan daerah	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	200.000.000	-	-	-	1 laporan	200.000.000	0 laporan	5.700.000	0 laporan	24.916.600	0 laporan	24.916.600	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000		
4 03 4 03 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	60%	247.899.400	50%	50%	100%	60%	247.899.400	15%	17.027.000	15%	40.535.400	30%	40.535.400	60%	247.899.400	60%	964.809.400		
4 03 4 03 01 16 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	247.899.400	24 bulan	24 bulan	100%	12 bulan	247.899.400	3 bulan	17.027.000	3 bulan	40.535.400	6 bulan	40.535.400	12 bulan	247.899.400	36 bulan	964.809.400		
4 03 4 03 01 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	200.000.000	0 dokumen	26.955.000	0 dokumen	61.500.100	0 dokumen	61.500.100	1 dokumen	200.000.000	3 dokumen	367.171.171		
4 03 4 03 01 17 03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	200.000.000	0 dokumen	26.955.000	0 dokumen	61.500.100	0 dokumen	61.500.100	1 dokumen	200.000.000	3 dokumen	367.171.171		
4 03 4 03 01 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	4 dokumen	1.162.000.000	8 dokumen	8 dokumen	100%	4 dokumen	1.162.000.000	0 dokumen	251.130.398	0 dokumen	554.165.681	0 dokumen	554.165.681	3 dokumen	1.072.000.000	11 dokumen	2.600.954.630		
		Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPd	25%		20%	10,2%	51%	25%		0%		15%		15%		25%		25%			
4 03 4 03 01 19 02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	9 kali	100.000.000	12 kali	12 kali	100%	9 kali	100.000.000	3 kali	28.783.000	6 kali	68.510.777	9 kali	68.510.777	9 kali	100.000.000	21 kali	214.865.400		
4 03 4 03 01 19 04	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	136.000.000	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	136.000.000	3 bulan	28.612.768	3 bulan	59.047.029	6 bulan	59.047.029	12 bulan	136.000.000	24 bulan	286.000.000		
4 03 4 03 01 19 05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	200.000.000	0 dokumen	47.957.056	0 dokumen	97.619.015	0 dokumen	97.619.015	1 dokumen	200.000.000	3 dokumen	596.920.300		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) PADA RENSTRA TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) DAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019	
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	6		7			6		9		10		13		14		15	
4 03 4 03 01 19 07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh	1 dokumen	90.000.000	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	90.000.000
4 03 4 03 01 19 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	350.000.000	4 dokumen	4 dokumen	100%	2 dokumen	350.000.000	0 dokumen	35.118.300	0 dokumen	161.009.480	0 dokumen	161.009.480	1 dokumen	350.000.000	5 dokumen	894.355.880
4 03 4 03 01 19 10	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Jumlah koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	8 kali	40.000.000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	-	-
4 03 4 03 01 19 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	5 dokumen	144.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	144.000.000	0 dokumen	54.728.550	0 dokumen	69.328.550	0 dokumen	69.328.550	1 dokumen	144.000.000	3 dokumen	376.813.050
4 03 4 03 01 19 12	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	9 kali	142.000.000	-	-	-	9 kali	142.000.000	4 kali	55.930.724	3 kali	98.650.830	7 kali	98.650.830	9 kali	142.000.000	9 kali	142.000.000
4 03 4 03 01 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN perencanaan yang memahami perencanaan pembangunan daerah	0 orang	-	15 orang	0 orang	0%	0 orang	-	-	-	-	-	-	-	0 orang	-	15 orang	300.000.000
4 03 4 03 01 20 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	0 orang	-	15 orang	0 orang	0%	0 orang	-	-	-	-	-	-	-	0 orang	-	15 orang	300.000.000
4 03 4 03 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	13 dokumen	2.261.712.720	22 dokumen	22 dokumen	100%	13 dokumen	2.071.712.720	4 dokumen	233.823.000	1 dokumen	707.960.594	5 dokumen	707.960.594	13 dokumen	2.261.712.720	35 dokumen	6.986.069.045
		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	25%		20%	15,1%	76%	25%		0%		14,96%		15%		14,96%		25%	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100%	2 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		7 dokumen	
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%		100%	96,6%	97%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
4 03 4 03 01 21 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	171.314.100	2 forum	2 forum	100%	1 forum	171.314.100	1 forum	118.195.500	0 forum	119.615.500	1 forum	119.615.500	1 forum	171.314.100	3 forum	489.406.600

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) PADA RENSTRA TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) DAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019			
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	6		7			6		9		10		13		14		15			
4 03 4 03 01 21 05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	0 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0 dokumen	-	1 dokumen	200.000.000		
4 03 4 03 01 21 07	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD/ Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	0 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	550.000.000		
4 03 4 03 01 21 08	Penyusunan rancangan RKPd	Jumlah dokumen RKPd dan dokumen Perubahan RKPd yang disusun	2 dokumen	247.778.400	4 dokumen	4 dokumen	100%	2 dokumen	247.778.400	1 dokumen	30.256.500	0 dokumen	70.153.494	1 dokumen	70.153.494	2 dokumen	247.778.400	6 dokumen	775.648.400		
4 03 4 03 01 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 kali	288.374.400	6 kali	6 kali	100%	3 kali	288.374.400	1 kali	35.495.000	2 kali	217.104.700	3 kali	217.104.700	3 kali	288.374.400	9 kali	814.244.400		
4 03 4 03 01 21 11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen RKJP yang disusun tepat waktu	1 dokumen	223.977.720	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	223.977.720	1 dokumen	32.466.000	0 dokumen	75.466.000	1 dokumen	75.466.000	1 dokumen	223.977.720	3 dokumen	748.357.720		
4 03 4 03 01 21 12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	254.393.100	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	254.393.100	1 dokumen	1.210.000	0 dokumen	121.958.000	1 dokumen	121.958.000	1 dokumen	254.393.100	3 dokumen	701.118.100		
4 03 4 03 01 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPd	4 dokumen	87.265.000	8 dokumen	8 dokumen	100%	4 dokumen	87.265.000	1 dokumen	-	1 dokumen	-	2 dokumen	-	4 dokumen	87.265.000	12 dokumen	628.395.875		
4 03 4 03 01 21 15	Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	170.000.000	1 kali	1 kali	100%	1 kali	170.000.000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	1 kali	170.000.000	2 kali	370.000.000		
4 03 4 03 01 21 21	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK Dumai	1 dokumen	106.610.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	226.610.000	0 dokumen	4.920.000	0 dokumen	16.534.300	0 dokumen	16.534.300	1 dokumen	106.610.000	3 dokumen	568.510.600		
4 03 4 03 01 21 24	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	237.000.000	0 dokumen	5.640.000	0 dokumen	49.740.000	0 dokumen	49.740.000	1 dokumen	237.000.000	2 dokumen	500.387.350		
4 03 4 03 01 21 25	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	165.000.000	0 dokumen	5.640.000	0 dokumen	37.388.600	0 dokumen	37.388.600	1 dokumen	165.000.000	2 dokumen	330.000.000		
5 04 5 04 02 22 27	Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	190.000.000	-	-	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	190.000.000	1 dokumen	190.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PADA RENSTRA TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019			
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	6		7			6		9		10		13		14		15			
6 05 6 05 03 23 67	Koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	120.000.000	-	-	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	120.000.000		
4 03 4 03 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 dokumen	330.000.000	4 dokumen	4 dokumen	100%	2 dokumen	330.000.000	0 dokumen	42.484.660	0 dokumen	114.084.136	0 dokumen	114.084.136	2 dokumen	330.000.000	6 dokumen	896.735.700		
		Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKP	25%		20%	28,5%	142%	25%		0%		30,08%		30,08%		30,08%		25%			
4 03 4 03 01 22 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	200.000.000	0 dokumen	42.484.660	0 dokumen	90.102.891	0 dokumen	90.102.891	1 dokumen	200.000.000	3 dokumen	551.498.700		
4 03 4 03 01 22 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	130.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	130.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	23.981.245	0 dokumen	23.981.245	1 dokumen	130.000.000	3 dokumen	345.237.000		
4 03 4 03 01 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen	915.796.800	11 dokumen	11 dokumen	100%	5 dokumen	915.796.800	0 dokumen	141.508.400	0 dokumen	280.428.800	0 dokumen	280.428.800	5 dokumen	915.796.800	16 dokumen	2.439.970.650		
		Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKP	25%		20%	19,5%	98%	25%		0%		7,48%				7,48%		25%			
4 03 4 03 01 23 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	195.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	195.000.000	0 dokumen	38.684.600	0 dokumen	88.458.900	0 dokumen	88.458.900	1 dokumen	195.000.000	3 dokumen	578.842.000		
4 03 4 03 01 23 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	155.000.000	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	155.000.000	0 dokumen	13.788.000	0 dokumen	33.888.000	0 dokumen	33.888.000	1 dokumen	155.000.000	5 dokumen	388.507.200		
4 03 4 03 01 23 05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	230.796.800	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	230.796.800	0 dokumen	44.018.700	0 dokumen	73.591.000	0 dokumen	73.591.000	1 dokumen	230.796.800	3 dokumen	632.086.650		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) PADA RENSTRA TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT) S.D. TAHUN 2018			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2019				REALISASI KINERJA S.D. TW II TAHUN 2019		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019		TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2019			
			K	Rp.	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	6		7			6		9		10		13		14		15			
4 03 4 03 01 23 06	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	1 dokumen	175.000.000	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	175.000.000	0 dokumen	45.017.100	0 dokumen	84.490.900	0 dokumen	84.490.900	1 dokumen	175.000.000	3 dokumen	505.534.800		
4 03 4 03 01 23 07	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	160.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	160.000.000	2 dokumen	335.000.000		
4 03 4 03 01 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 03 4 03 01 24 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan terhadap penggunaan sumber energi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 04 4 03 01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	90%	30.000.000	90%	30.000.000		
4 04 4 03 01 17 ##	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	-	-	-	90%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	90%	30.000.000	90%	30.000.000		
TOTAL				12.482.602.580					12.517.602.580		1.525.320.370		4.143.285.603		4.143.285.603		11.838.602.580		32.237.972.385		

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dari Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa sampai dengan Triwulan II terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan rencana aksi yang telah ditetapkan di awal tahun 2019, dimana kegiatan-kegiatan tersebut akan diselesaikan pada Triwulan IV. Kondisi ini dapat dilihat dari perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun 2019.

Berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021, terdapat 3 kegiatan yang direncanakan di tahun 2019 tapi tidak tertuang pada dokumen rencana kerja tahun 2019, diantaranya: (1) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor; (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan. Oleh sebab itu, ketiga kegiatan ini perlu dituangkan di dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019. Disisi lain terdapat beberapa kegiatan yang sebelumnya direncanakan pada dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019, tetapi tidak direncanakan pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021, diantaranya: (1) Kegiatan penyusunan rencana teknis ruang kawasan; (2) Kegiatan sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang; dan (3) Kegiatan koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan. Oleh sebab itu, ketiga kegiatan ini harus dihapus dari dokumen perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 ini seyogyanya dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Dumai yang diukur pencapaiannya melalui keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU). Empat IKU tersebut antara lain: (1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan; (2) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (3) Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA; dan (4) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Pada Tabel 2.1 di atas tersaji tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja pada Renja Bappeda. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan tahun 2018 terdapat beberapa indikator kinerja program/kegiatan yang pencapaiannya tidak sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan

pada dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Adapun kegiatan-kegiatan yang pencapaiannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan diantaranya:

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang;
- 2) Pengawasan pemanfaatan ruang;
- 3) Pembangunan gedung kantor;
- 4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- 5) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; dan
- 6) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.

Disisi lain terdapat kegiatan yang pencapaian indikatornya melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut tentunya mempengaruhi tercapai atau tidaknya indikator pada program terkait. Beberapa program yang pencapaiannya sampai dengan tahun 2018 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan diantaranya:

- 1) Program pemanfaatan ruang;
- 2) Program pengendalian pemanfaatan ruang;
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur;
- 4) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;
- 5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Program perencanaan pembangunan daerah; dan
- 7) Program perencanaan sosial dan budaya.

Disisi lain terdapat program yang pencapaian indikatornya melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Keberhasilan pencapaian target program/kegiatan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sementara kegagalan pencapaian pada indikator Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD, baik pada bidang infrastruktur dan kewilayahan maupun pada bidang sosial dan budaya, disebabkan oleh banyaknya usulan masyarakat yang diusulkan pada saat Musrenbang, namun tidak memperhatikan skala prioritas dari usulan-usulan tersebut dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2021, diantaranya:

- 1) Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakatsesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju; dan

- 2) Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting karena menjadi dasar dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penyajian isu-isu penting ini meliputi permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda, serta isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda sebagai berikut.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Identifikasi permasalahan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda. Adapun identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas Program dan Kegiatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal	Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana (renstra) kurang memperhatikan renstra Provinsi maupun Kementerian/Lembaga	Kurangnya aparatur perencana yang handal
2.	Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan	Permasalahan pembangunan hanya dibahas pada musrenbang, tidak dibahas secara berkala pada rapat koordinasi oleh instansi-instansi terkait	Penyelesaian masalah dan prioritas belum terpadu antar Perangkat Daerah
3.	Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan	Pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dilakukan hanya sekedar laporan tanpa tindak lanjut	Hasil pengendalian dan evaluasi belum dijadikan dasar pengambilan kebijakan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah	Dokumen perencanaan tidak dapat diimplementasikan	Dokumen perencanaan belum disusun dengan baik sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang telah ditetapkan
5.	Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Data dan informasi tidak valid	Data dan informasi tidak diperbaharui secara berkala
6.	Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah	Kurangnya pelatihan bagi aparatur perencana	Alokasi dana diklat aparatur perencana sangat terbatas
7.	Belum terpetakan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada	Minimnya data-data sebagai basis perencanaan	Data-data yang dimiliki sebagai basis perencanaan masih dalam lingkup makro, belum detail sampai ke lokasi yang terdampak masalah pembangunan sehingga arah kebijakan serta program/kegiatan yang direncanakan masih bersifat global
8.	Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah	Penyediaan data dan informasi pembangunan masih dianggap sebagai upaya pemenuhan data tanpa memperhatikan validasinya	Pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan belum maksimal
9.	Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah	Kerjasama antar daerah dan swasta dipandang tidak menarik dengan mekanisme yang rumit	Penguasaan aparatur terhadap perangkat aturan yang mengatur mekanisme kerjasama antar daerah dan swasta belum memadai
10.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Masyarakat tidak termotivasi mengikuti Musrenbang	Usulan masyarakat dalam musrenbang banyak yang tidak terakomodir di RKPD dan APBD

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Kota Dumai memiliki 19 fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahunan dan akhir masa jabatan Walikota, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
9. Penyusunan dokumen dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
10. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan tumbuh, kawasan kumuh serta dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
11. Perumusan kebijakan kerja sama pembangunan dengan daerah lain, lembaga, perguruan tinggi, instansi swasta dalam dan luar negeri;
12. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
13. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
14. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
15. Perumusan kebijakan kerjasama daerah dengan badan, lembaga, daerah lain, swasta dan luar negeri;

16. Penyusunan rencana induk, rencana aksi, *Master Plan* serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
17. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan umum, kepegawaian, program, keuangan dan aset; dan
19. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD “Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Jika disandingkan dengan hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 2.3 diatas maka program dan kegiatan prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat tersebut sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, dengan kegiatan prioritas:
 - a) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri;
 - b) Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan;
 - c) Koordinasi perencanaan penanganan perumahan; dan
 - d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan prioritas:
 - a) Penyusunan rancangan RKPD;
 - b) Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
 - c) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ);
 - d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e) Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai;
 - f) Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals;
 - g) Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
 - h) Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus; dan
 - i) Koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan prioritas:
 - a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan prioritas:
 - a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- c) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM;
- d) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan; dan
- e) Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM.

2.3.2. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang tersaji pada Tabel 2.3 diatas, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang diproksi ke dalam faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan pelayanan Bappeda. Selain dari hasil identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, faktor penghambat dan pendorong ini juga diidentifikasi berdasarkan telaahan perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2019, telaahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2019 dan telaahan RKP Tahun 2019.

A. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”***. Untuk merealisasikan Visi pembangunan Kota Dumai pada Tahun 2021, maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing;
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan;
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah; dan
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD “Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Terkait dengan hal tersebut,

beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota/Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Bappeda Berdasarkan Telaahan Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> - Bidang keilmuan aparatur yang tidak linier dengan tugas pokok dan fungsi; - Belum optimalnya ketersediaan data dasaryang secara berkala diperbaharui untuk analisis perencanaan; - Penguasaan aparatur terhadap aturan yang berlaku masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih rendah; - Peran serta sektor swasta dalam pembangunan masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi; - Sarana dan prasarana aparatur yang memadai; - Telah diimplementasikannya e-planning dan e-monev yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan. 	Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, 2019

2.3.3. Penentuan Isu-Isu Penting

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda serta gambaran pelayanan Bappeda, maka isu penting perencanaan pembangunan Kota Dumai adalah **“Peningkatan kualitas dokumen perencanaan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.”** Penetapan isu penting tersebut berkenaan dengan permasalahan:

1. Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan;
2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
3. Masih terdapatnya inkonsistensi/ketidakselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
4. Perencanaan pembangunan yang masih berorientasi pada output; dan
5. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tabel 3.1 berikut terlampir perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 yang disesuaikan dengan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2019.

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2019					CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	5	6	4	7	8	9	10		11	12	13	14
1 03	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1 03 4 03 01 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen tata ruang	5 dokumen	555.000.000			Jumlah dokumen tata ruang	1 dokumen	430.000.000				1 dokumen	438.600.000
1 03 4 03 01 31 06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan terhadap RTRW	1 dokumen	125.000.000		SKPD APBD	-	-	-				-	-
1 03 4 03 01 31 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	240.000.000		Kota APBD	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	240.000.000		Kota APBD		15 kali	244.800.000
1 03 4 03 01 31 13	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	190.000.000		Kota APBD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	190.000.000		Kota APBD		1 dokumen	193.800.000
1 03 4 03 01 32	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	255.000.000			Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	-				-	158.100.000
1 03 4 03 01 32 07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder	100.000.000		SKPD APBD	-	-	-				-	-
1 03 4 03 01 32 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	155.000.000		Kota APBD	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	-		Kota APBD		-	158.100.000
1 03 4 03 01 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	204.000.000			Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	0%	-				100%	208.080.000
1 03 4 03 01 33 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	3 kali	204.000.000		Kota APBD	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	0%	-		Kota APBD		100%	208.080.000
1 04	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1 04 4 03 01 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	100%	430.000.000			Persentase kualitas perumahan dan permukiman	100%	350.000.000				100%	350.000.000
1 04 4 03 01 15 03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	350.000.000		SKPD APBD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	350.000.000		SKPD APBD		1 dokumen	350.000.000
1 04 4 03 01 15 04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder	80.000.000		SKPD APBD	-	-	-				-	-
2 07	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													
2 07 4 03 01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	300.000.000			Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	300.000.000				1 dokumen	306.000.000
2 07 4 03 01 15 05	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen	1 dokumen	300.000.000		SKPD APBD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	300.000.000		SKPD APBD		1 dokumen	306.000.000
4 01	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN													
4 01 4 03 01 43	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	80.000.000			Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	80.000.000				90%	90.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2019					CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	5	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
4 01 4 03 01 43 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	80.000.000	Kota	APBD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	80.000.000	Kota	APBD	90%	90.000.000	
4 02	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN													
4 02 4 03 01 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000			Persentase peningkatan Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000			-	-	
4 02 4 03 01 20 25	Evaluasi realisasi anggaran	Meningkatnya serapan realisasi anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen TEPR yang disusun	4 dokumen	250.000.000	SKPD	APBD	-	-	
4 03	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN													
4 03 4 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.456.193.660			Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.286.193.660			100%	2.460.000.000	
4 03 4 03 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	12 bulan	3.600.000	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.600.000	SKPD	APBD	12 bulan	3.607.200	
4 03 4 03 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	-	-	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 bulan	10.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	30.000.000	
4 03 4 03 01 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya panitia pameran Kota Dumai Tahun 2019	1 kali	30.000.000	SKPD	APBD	Jumlah Partisipasi Bappeda dalam pameran Dumai Expo	0 kali	-	SKPD	APBD	-	-	
4 03 4 03 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	24 unit	55.000.000	SKPD	APBD	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas	25 unit	55.000.000	SKPD	APBD	24 unit	55.110.000	
4 03 4 03 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	125.000.000	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	125.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	125.250.000	
4 03 4 03 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 unit	84.350.000	SKPD	APBD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	93 unit	84.350.000	SKPD	APBD	93 unit	84.518.700	
4 03 4 03 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	199.000.000	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	199.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	199.398.000	
4 03 4 03 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.747.660	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.747.660	SKPD	APBD	12 bulan	62.873.150	
4 03 4 03 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	240.000.000	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	50.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	110.480.000	
4 03 4 03 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	50.000.000	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	50.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	80.160.000	
4 03 4 03 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat serta harian	12 bulan	84.096.000	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	84.096.000	SKPD	APBD	12 bulan	84.264.200	
4 03 4 03 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 bulan	700.000.000	SKPD	APBD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	740.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	741.400.000	
4 03 4 03 01 01 19	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	122.400.000	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	122.400.000	SKPD	APBD	12 bulan	162.644.800	
4 03 4 03 01 01 20	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terbayarnya pembayaran honor jasa administrasi perkantoran	12 bulan	700.000.000	SKPD	APBD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	700.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	720.293.950	
4 03 4 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
4 03 4 03 01 02 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	200.000.000	SKPD	APBD	1 kegiatan	202.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2019					CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	5	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
4 03 4 03 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	2 unit	600.000.000	SKPD	APBD	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	1 unit	300.000.000	SKPD	APBD	1 unit	300.000.000	
4 03 4 03 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	9 unit	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	200.000.000	SKPD	APBD	40 unit	202.000.000	
4 03 4 03 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	11 unit	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	200.000.000	SKPD	APBD	30 unit	202.000.000	
4 03 4 03 01 02 10	Pengadaan mebeleur	-	-	-	-	-	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	-	-	SKPD		-	-	
4 03 4 03 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala	8 unit	220.000.000	SKPD	APBD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	220.000.000	SKPD	APBD	3 unit	222.200.000	
4 03 4 03 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	24 kendaraan	400.000.000	SKPD	APBD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	25 kendaraan	400.000.000	SKPD	APBD	26 kendaraan	415.691.983	
4 03 4 03 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	-	-	-	-	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	1 unit	200.000.000	SKPD	APBD	3 unit	300.000.000	
4 03 4 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	530.000.000			Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85%	530.000.000			85%	530.600.000	
4 03 4 03 01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	12 orang	130.000.000	SKPD	APBD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	12 orang	130.000.000	SKPD	APBD	22 orang	130.600.000	
4 03 4 03 01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	200.000.000	SKPD	APBD	1 kali	200.000.000	
4 03 4 03 01 05 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani	12 kali	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	200.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	200.000.000	
		Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan fisik dan mental di Bappeda	50 orang											
4 03 4 03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	3 dokumen	130.000.000			Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 dokumen	130.000.000			5 dokumen	131.110.096	
4 03 4 03 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	70.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	70.000.000	SKPD	APBD	3 dokumen	70.510.096	
4 03 4 03 01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	60.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	60.000.000	SKPD	APBD	2 dokumen	60.600.000	
4 03 4 03 01 15	Program pengembangan data/ informasi	Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	70%	550.000.000			Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	70%	550.000.000			80%	561.000.000	
4 03 4 03 01 15 07	Sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah aplikasi yang terinput	2 aplikasi	350.000.000	SKPD	APBD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	350.000.000	SKPD	APBD	3 aplikasi	357.000.000	
		Jumlah orang admin OPD aplikasi Simreda yang terbayarkan	37 orang											
4 03 4 03 01 15 08	Penyusunan data perencanaan daerah	Jumlah data yang terinput pada aplikasi informasi database pembangunan Kota Dumai	60%	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	200.000.000	SKPD	APBD	1 laporan	204.000.000	
		Jumlah buletin pada Litbang Bappeda	1 buletin											
		Jumlah laporan SIPD	1 laporan											
4 03 4 03 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	60%	247.899.400			Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	60%	247.899.400			70%	252.857.388	
4 03 4 03 01 16 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	1 tahun	247.899.400	SKPD	APBD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	247.899.400	SKPD	APBD	12 bulan	252.857.388	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2019					CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	5	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Jumlah Laporan TJSPI/CSR yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah	1 laporan											
4 03 4 03 01 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 dokumen	200.000.000			Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 dokumen	200.000.000			1 dokumen	204.000.000	
4 03 4 03 01 17 03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	200.000.000	SKPD	APBD	1 dokumen	204.000.000	
4 03 4 03 01 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 dokumen	1.162.000.000			Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	3 dokumen	1.072.000.000			4 dokumen	1.185.240.000	
4 03 4 03 01 19 02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	9 kali	100.000.000	SKPD	APBD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	9 kali	100.000.000	SKPD	APBD	10 kali	102.000.000	
4 03 4 03 01 19 04	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi- Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian	6 OPD	136.000.000	SKPD	APBD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	136.000.000	SKPD	APBD	12 bulan	138.720.000	
4 03 4 03 01 19 05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Terwujudnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	200.000.000	SKPD	APBD	1 dokumen	204.000.000	
4 03 4 03 01 19 07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh	1 dokumen	50.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh	-	-	SKPD	APBD	1 dokumen	91.800.000	
4 03 4 03 01 19 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tercapainya dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang di Kota Dumai	2 dokumen	350.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	350.000.000	SKPD	APBD	1 dokumen	357.000.000	
4 03 4 03 01 19 10	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Terlaksananya koordinasinya penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	8 kali	40.000.000	SKPD	APBD	Jumlah koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	
4 03 4 03 01 19 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	144.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	144.000.000	SKPD	APBD	1 dokumen	146.880.000	
4 03 4 03 01 19 12	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	9 kali	142.000.000	SKPD	APBD	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	9 kali	142.000.000	SKPD	APBD	10 kali	144.840.000	
4 03 4 03 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 dokumen	2.071.712.720			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	13 dokumen	2.261.712.720			13 dokumen	2.258.102.720	
		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD					Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	25%				30%		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA					Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dokumen				2 dokumen		
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD					Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%				100%		
4 03 4 03 01 21 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya forum OPD	1 forum	171.314.100	SKPD	APBD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	171.314.100	SKPD	APBD	1 forum	171.314.100	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2019					CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	5	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
4 03 4 03 01 21 08	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	247.778.400	SKPD	APBD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	247.778.400	SKPD	APBD		2 dokumen	247.778.400
4 03 4 03 01 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2019	3 kali	288.374.400	Kota	APBD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 kali	288.374.400	Kota	APBD		3 kali	288.374.400
4 03 4 03 01 21 11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi	1 dokumen	223.977.720	Kota	APBD	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 dokumen	223.977.720	Kota	APBD		1 dokumen	223.977.720
4 03 4 03 01 21 12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	254.393.100	Kota	APBD	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	254.393.100	Kota	APBD		1 dokumen	254.393.100
4 03 4 03 01 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	5 dokumen	87.265.000	Kota	APBD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	4 dokumen	87.265.000	Kota	APBD		4 dokumen	87.265.000
4 03 4 03 01 21 15	Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	1 kali	170.000.000	Kota	APBD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	170.000.000	Kota	APBD		1 kali	170.000.000
4 03 4 03 01 21 21	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 dokumen	226.610.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 dokumen	106.610.000	SKPD	APBD		-	-
4 03 4 03 01 21 24	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	237.000.000
4 03 4 03 01 21 25	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	165.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	165.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	198.000.000
4 03 4 03 01 21 27	Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	190.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	200.000.000
4 03 4 03 01 21 67	Koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	-	-	-	-	-	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	120.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	180.000.000
4 03 4 03 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 dokumen	330.000.000			Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 dokumen	330.000.000				2 dokumen	336.600.000
							Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	25%					30%	
4 03 4 03 01 22 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	200.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	200.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	204.000.000
4 03 4 03 01 22 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	1 dokumen	130.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	130.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	132.600.000
4 03 4 03 01 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen	915.796.800			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen	915.796.800				5 dokumen	933.212.736

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019					PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2019					CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	5	6	4	7	8	9	10		11	12	13	14
							Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	25%					30%	
4 03 4 03 01 23 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	90%	195.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	195.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	198.000.000
4 03 4 03 01 23 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	155.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	155.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	158.100.000
4 03 4 03 01 23 05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	90%	230.796.800	SKPD	APBD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	230.796.800	SKPD	APBD		1 dokumen	235.412.736
4 03 4 03 01 23 06	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	90%	175.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	1 dokumen	175.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	178.500.000
4 03 4 03 01 23 07	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	160.000.000	SKPD	APBD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	160.000.000	SKPD	APBD		1 dokumen	163.200.000
4 04 4 03 01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000			Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000				90%	30.000.000
4 04 4 03 01 17 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	SKPD	APBD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	SKPD	APBD		90%	30.000.000
TOTAL				12.517.602.580					11.683.602.580					12.277.394.923

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Kota Dumai Tahun 2019 merupakan perubahan dokumen perencanaan Bappeda Tahun 2019 yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perumusan perubahan Renja Bappeda ini disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2019 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tepatnya Bagian Keenam Bab VII "Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah". Selanjutnya setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, perubahan dokumen rencana tahunan ini dijadikan acuan oleh Kepala Bappeda dalam menyusun perubahan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2019.

Lampiran : Tabel ePlanning :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0.01.4.03.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									2.456.193.660	2.286.193.660	(170.000.000)							
0.01.4.03.01.001.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-			SKPD		6 bulan	-	10.000.000	10.000.000		APBD	0 bulan	30.000.000	baru		
0.01.4.03.01.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	-		Kota	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	3.600.000	3.600.000	-	APBD	APBD	12 Bulan	3.607.200	berjalan		
0.01.4.03.01.001.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya panitia pameran Kota Dumai Tahun 2019	Jumlah Partisipasi Bappeda dalam pameran Dumai Expo	-			SKPD	SKPD	1 kali	0 kali	30.000.000	-	(30.000.000)	APBD	APBD	1 kali	-	berjalan	
0.01.4.03.01.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas	-			SKPD	SKPD	24 unit	25 unit	55.000.000	55.000.000	-	APBD	24 unit	55.110.000	berjalan		
0.01.4.03.01.001.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	-			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 bulan	125.000.000	125.000.000	-	APBD	APBD	12 bulan	125.250.000	berjalan	
0.01.4.03.01.001.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-			SKPD	SKPD	15 unit	93 unit	84.350.000	84.350.000	-	APBD	18 unit	84.518.700	berjalan		
0.01.4.03.01.001.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	-			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	199.000.000	199.000.000	-	APBD	12 bulan	199.398.000	berjalan		
0.01.4.03.01.001.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	62.747.660	62.747.660	-	APBD	12 bulan	62.873.150	berjalan		
0.01.4.03.01.001.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	-			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	240.000.000	50.000.000	(190.000.000)	APBD	12 bulan	110.480.000	berjalan		
0.01.4.03.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-			SKPD	SKPD	2 Jenis	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-	APBD	2 bulan	80.160.000	berjalan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.01.4.03.01.001.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Tamu,Rapat serta Harian	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	-		SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	84.096.000	84.096.000	-	-	APBD	12 bulan	84.264.200	berjalan	
0.01.4.03.01.001.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		SKPD	SKPD	12 Bulan	12 bulan	700.000.000	740.000.000	40.000.000	APBD	APBD	12 bulan	741.400.000	berjalan	
0.01.4.03.01.001.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	-		SKPD	SKPD	6 orang	12 bulan	122.400.000	122.400.000	-	APBD	APBD	6 bulan	162.644.800	berjalan	
0.01.4.03.01.001.020	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya pembayaran honor jasa administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	-		SKPD	SKPD	12 Bulan	12 bulan	700.000.000	700.000.000	-	-	APBD	12 bulan	720.293.950	berjalan	
0.01.4.03.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									1.820.000.000	1.720.000.000	(100.000.000)						
0.01.4.03.01.002.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	-			SKPD		1 unit	-	200.000.000	200.000.000		APBD	0 unit	300.000.000	baru	
0.01.4.03.01.002.003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-		SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	1 kegiatan	202.000.000	berjalan	
0.01.4.03.01.002.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	-		SKPD	SKPD	2 unit	1 unit	600.000.000	300.000.000	(300.000.000)	APBD	APBD	2 unit	300.000.000	berjalan	
0.01.4.03.01.002.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		SKPD	SKPD	9 unit	26 unit	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	9 unit	202.000.000	berjalan	
0.01.4.03.01.002.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur BAPPEDA	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	-		SKPD	SKPD	11 unit	18 unit	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	11 unit	202.000.000	berjalan	
0.01.4.03.01.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	-		SKPD	SKPD	8 unit	3 unit	220.000.000	220.000.000	-	APBD	APBD	8 unit	222.200.000	berjalan	
0.01.4.03.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	-		SKPD	SKPD	24 Kendaraan	25 Kendaraan	400.000.000	400.000.000	-	APBD	APBD	24 Kendaraan	415.691.983	berjalan	
0.01.4.03.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									530.000.000	530.000.000	-						
0.01.4.03.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	-		SKPD	SKPD	12 orang	12 orang	130.000.000	130.000.000	-	APBD	APBD	12 orang	130.600.000	berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.01.4.03.01.005.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	-		SKPD	SKPD	1 Kali	1 kali	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	1 kali	200.000.000	berjalan	
0.01.4.03.01.005.004	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pembina jasmani dan rohani; Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan fisik dan mental di Bappeda	Jumlah pembina jasmani dan rohani	-		SKPD	SKPD	12 Kali;50 Orang	12 bulan	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	12 bulan	200.000.000	berjalan	
0.01.4.03.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									130.000.000	130.000.000	-						
0.01.4.03.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	-		SKPD	SKPD	3 dokumen	3 dokumen	70.000.000	70.000.000	-	APBD	APBD	3 dokumen	70.510.096	berjalan	
0.01.4.03.01.006.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	-		SKPD	SKPD	2 dokumen	2 dokumen	60.000.000	60.000.000	-	APBD	APBD	2 dokumen	60.600.000	berjalan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.4.03.01.031	Program Perencanaan Tata Ruang									555.000.000	430.000.000	(125.000.000)						
1.03.4.03.01.031.006	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis Ruang Kawasan terhadap RTRW		-		SKPD	SKPD	1 dokumen		125.000.000	-	(125.000.000)	APBD	APBD		-	berjalan	
1.03.4.03.01.031.010	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	terlaksananya Koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Koordinasi tentang rencana tata ruang	-		Kota	Kota	15 kali	15 kali	240.000.000	240.000.000	-	APBD	APBD	15 kali	244.800.000	berjalan	
1.03.4.03.01.031.013	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	-		Kota	Kota	1 dokumen	1 dokumen	190.000.000	190.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	193.800.000	berjalan	
1.03.4.03.01.032	Program Pemanfaatan Ruang									255.000.000	-	(255.000.000)						
1.03.4.03.01.032.007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder yang terkait		-		SKPD	SKPD	15 stakeholder		100.000.000	-	(100.000.000)	APBD	APBD		-	berjalan	
1.03.4.03.01.032.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	-		Kota	Kota	1 dokumen	0 dokumen	155.000.000	-	(155.000.000)	APBD	APBD	1 dokumen	158.100.000	berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.03.4.03.01.033	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang											204.000.000	-	(204.000.000)							
1.03.4.03.01.033.005	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	-		Kota	Kota	3 kali	0%	204.000.000	-	(204.000.000)	APBD	APBD	3%	208.080.000	berjalan				
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman																					
1.04.4.03.01.015	Program Pengembangan Perumahan											430.000.000	350.000.000	(80.000.000)							
1.04.4.03.01.015.003	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Dumai	Jumlah dokumen tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Dumai	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	350.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	350.000.000	berjalan				
1.04.4.03.01.015.004	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder yang terkait		-		SKPD	SKPD	15 stakeholder		80.000.000	-	(80.000.000)	-	APBD		-	berjalan				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																					
2.07.4.03.01.015	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan											300.000.000	300.000.000	-							
2.07.4.03.01.015.005	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000	300.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	306.000.000	berjalan				
Administrasi Pemerintahan																					
4.01.4.03.01.035	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah											80.000.000	80.000.000	-							
4.01.4.03.01.035.003	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	-		Kota	SKPD	90%	90%	80.000.000	80.000.000	-	APBD	APBD	90%	90.000.000	berjalan				
Pengawasan																					
4.02.4.03.01.020	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											250.000.000	250.000.000	-							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4.02.4.03.01.020.026	Evaluasi realisasi anggaran	Meningkatnya Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	Jumlah dokumen TEPR yang disusun	-		SKPD	SKPD	80%	4 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-	APBD	APBD	90 Dokumen	-	berjalan		
Perencanaan																			
4.03.4.03.01.015	Program Pengembangan data/informasi								550.000.000	550.000.000	-								
4.03.4.03.01.015.007	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Jumlah aplikasi yang terinput; Jumlah orang admin OPD aplikasi Simreda yang terbayarkan	Jumlah aplikasi yang digunakan	-		SKPD	SKPD	2 aplikasi ;37 orang	2 aplikasi	350.000.000	350.000.000	-	APBD	APBD	2 aplikasi	357.000.000	berjalan		
4.03.4.03.01.015.009	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	Jumlah data yang terinput pada aplikasi informasi database pembangunan Kota Dumai; Jumlah buletin pada Litbang Bappeda; Jumlah laporan SIPD	Jumlah laporan SIPD	-		SKPD	SKPD	60 %;1 Buletin;1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	1 Laporan	204.000.000	berjalan		
4.03.4.03.01.016	Program Kerjasama Pembangunan								247.899.400	247.899.400	-								
4.03.4.03.01.016.004	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; Jumlah Laporan TJSJ/CSR yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	-		SKPD	SKPD	1 Tahun;1 Laporan	12 bulan	247.899.400	247.899.400	-	APBD	APBD	1 bulan	252.857.388	berjalan		
4.03.4.03.01.017	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								200.000.000	200.000.000	-								
4.03.4.03.01.017.003	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	204.000.000	berjalan		
4.03.4.03.01.019	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar								1.162.000.000	1.072.000.000	(90.000.000)								
4.03.4.03.01.019.002	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	-		SKPD	SKPD	9 kali	9 kali	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	10 kali	102.000.000	berjalan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.019.004	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya keselaran perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	-		SKPD	SKPD	6 OPD	12 bulan	136.000.000	136.000.000	-	APBD	APBD	6 bulan	138.720.000	berjalan	
4.03.4.03.01.019.005	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	1 Dokumen	204.000.000	berjalan	
4.03.4.03.01.019.009	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tercapainya dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	-		SKPD	SKPD	2 dokumen	1 dokumen	350.000.000	350.000.000	-	APBD	APBD	2 dokumen	357.000.000	berjalan	
4.03.4.03.01.019.010	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Terlaksananya koordinasinya penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan		-		SKPD	SKPD	8 kali		40.000.000	-	(40.000.000)	APBD	APBD		-	berjalan	
4.03.4.03.01.019.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	144.000.000	144.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	146.880.000	berjalan	
4.03.4.03.01.019.012	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	-		SKPD	SKPD	9 kali	9 kali	142.000.000	142.000.000	-	APBD	APBD	10 kali	144.840.000	berjalan	
4.03.4.03.01.019.013	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	0 dokumen	50.000.000	-	(50.000.000)	APBD	APBD	1 dokumen	91.800.000	berjalan	
4.03.4.03.01.021	Program perencanaan pembangunan daerah									2.071.712.720	2.261.712.720	190.000.000						
4.03.4.03.01.021.067	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	-			Kota		1 Dokumen	-	120.000.000	120.000.000		APBD	0 Dokumen	180.000.000	baru	
4.03.4.03.01.021.027	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	-			Kota		1 dokumen	-	190.000.000	190.000.000		APBD	0 dokumen	200.000.000	baru	
4.03.4.03.01.021.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya forum OPD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	-		SKPD	SKPD	1 forum	1 forum	171.314.100	171.314.100	-	APBD	APBD	1 forum	171.314.100	berjalan	
4.03.4.03.01.021.008	Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	-		SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	247.778.400	247.778.400	-	APBD	APBD	2 Dokumen	247.778.400	berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.021.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2019	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	-		Kota	Kota	3 kali	3 kali	288.374.400	288.374.400	-	APBD	APBD	3 kali	288.374.400	berjalan	
4.03.4.03.01.021.011	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi	Jumlah LKIP yang disusun tepat waktu	-		Kota	Kota	1 dokumen	1 dokumen	223.977.720	223.977.720	-	APBD	APBD	1 dokumen	223.977.720	berjalan	
4.03.4.03.01.021.012	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	-		Kota	Kota	1 dokumen	1 dokumen	254.393.100	254.393.100	-	APBD	APBD	1 dokumen	254.393.100	berjalan	
4.03.4.03.01.021.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPDP	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPDP	-		Kota	Kota	5 dokumen	4 dokumen	87.265.000	87.265.000	-	APBD	APBD	5 dokumen	87.265.000	berjalan	
4.03.4.03.01.021.015	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	-		Kota	Kota	1 Kali	1 Kali	170.000.000	170.000.000	-	APBD	APBD	1 Kali	170.000.000	berjalan	
4.03.4.03.01.021.021	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	226.610.000	106.610.000	(120.000.000)	APBD	APBD	1 dokumen	-	berjalan	
4.03.4.03.01.021.024	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	237.000.000	237.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	237.000.000	berjalan	
4.03.4.03.01.021.025	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	-		SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000	165.000.000	-	APBD	APBD	1 Dokumen	198.000.000	berjalan	
4.03.4.03.01.022	Program perencanaan pembangunan ekonomi									330.000.000	330.000.000	-						
4.03.4.03.01.022.004	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	204.000.000	berjalan	
4.03.4.03.01.022.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	130.000.000	130.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	132.600.000	berjalan	
4.03.4.03.01.023	Program perencanaan sosial dan budaya									915.796.800	915.796.800	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.023.003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	-		SKPD	SKPD	90%	1 dokumen	195.000.000	195.000.000	-	APBD	APBD	90 dokumen	198.000.000	berjalan	
4.03.4.03.01.023.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	155.000.000	155.000.000	-	APBD	APBD	1 dokumen	158.100.000	berjalan	
4.03.4.03.01.023.005	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	-		SKPD	SKPD	90%	1 dokumen	230.796.800	230.796.800	-	APBD	APBD	90 dokumen	235.412.736	berjalan	
4.03.4.03.01.023.006	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	-		SKPD	SKPD	90%	1 dokumen	175.000.000	175.000.000	-	APBD	APBD	90 dokumen	178.500.000	berjalan	
4.03.4.03.01.023.008	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	-		SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	160.000.000	160.000.000	-	-	APBD	1 dokumen	163.200.000	berjalan	
Keuangan																		
4.04.4.03.01.017	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									30.000.000	30.000.000	-						
4.04.4.03.01.017.110	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	-		SKPD	SKPD	90%	90%	30.000.000	30.000.000	-	-	-	90%	30.000.000	berjalan	
JUMLAH										12.517.602.580	11.683.602.580	(834.000.000)				12.277.394.923		